

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Awal munculnya perkotaan berasal dari pemukiman kecil yang memiliki kondisi geografis yang strategis untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti berdagang dan kegiatan sosial lainnya. Seiring berjalannya waktu pemukiman kecil berubah menjadi perkotaan, perubahan tersebut disertai dengan fenomena, seperti pertumbuhan penduduk, pembangunan fasilitas kota dan pemukiman yang semakin padat. Fenomena tersebut mengakibatkan meningkatnya kebutuhan sarana dan prasarana pemukiman, kondisi tersebut dipengaruhi oleh bertambahnya aktivitas manusia di perkotaan terutama pada bidang ekonomi, sosial, dan mobilisasi manusia. Kemudian jumlah penduduk yang semakin meningkat menyebabkan tingginya tuntutan kebutuhan berupa tempat tinggal, untuk itu masyarakat membangun rumah tinggal. Keterbatasan lahan dan sarana prasarana yang dimiliki oleh perkotaan menyebabkan ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat, sehingga menimbulkan pemukiman kumuh yang padat dan tidak layak huni.

Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu fenomena yang terjadi dalam perkembangan suatu daerah, pertumbuhan penduduk yang tidak terkontrol memicu timbulnya masalah terutama pada Kawasan permukiman. Pertumbuhan penduduk yang tidak dimbangi tersediannya lahan permukiman akan menimbulkan ketidakseimbangan yang mengakibatkan pembangunan tempat tinggal yang tidak layak dan berhimpitan hingga menjadi permukiman kumuh.

Permukiman kumuh diatur dalam Peraturan Menteri PUPR No 2 tahun 2016, permukiman kumuh adalah wilayah permukiman yang tidak layak huni karena kualitas bangunan, kepadatan bangunan yang tinggi dan ketidakaturan bangunan yang tidak memenuhi syarat bangunan layak huni.

Indonesia merupakan negara yang berpotensi memiliki permasalahan kepadatan penduduk dan kualitas lingkungan yang baik, dengan jumlah penduduk yang mencapai 265 juta jiwa, Indonesia menempati peringkat keempat dalam ranking jumlah penduduk terbesar di dunia. Kawasan permukiman kumuh termasuk dalam masalah penting yang harus segera diselesaikan. Target Kementerian PUPR mengenai penanganan permukiman kumuh yaitu mengurangi jumlah luasan permukiman kumuh Indonesia yang terhitung pada tahun 2014 mencapai 38.431 Ha. Penyelesaian permukiman kumuh ini dilakukan melalui perbaikan infrastruktur lingkungan, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Menurut Sugihrdjo sebagai Kepala Balai Sarana Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah, luas permukiman kumuh di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 tersebar pada 35 kabupaten/kota, dengan luasan wilayah sebesar 3.900,88 Ha. Luasan wilayah permukiman kumuh tersebut didukung dengan tingkat kepadatan penduduk provinsi Jawa Tengah mencapai 1.060/km².

Permukiman kumuh di Kabupaten Semarang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2011-2031. Adanya Undang-Undang tersebut menjadi acuan dalam pengembangan wilayah dan pemanfaatan ruang serta menjadi acuan untuk keseimbangan pembangunan dan acuan dalam penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah mengacu pada: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi, dan Nasional. Aturan tersebut merupakan salah satu langkah mewujudkan sasarankota tanpa permukiman kumuh di tahun 2019, Direktorat Jenderal Cipta Karya membuat wadah kolaborasi melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

Pembangunan suatu daerah memerlukan berbagai proses dalam pembagian peran pemangku kepentingan, dan pengalokasian sumber daya demi kelancaran pembangunan. Untuk itu diperlukan penyusunan yang tepat agar pembangunan dapat tepat sasaran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah sebagai pelaku utama pelaksanaan program KOTAKU dalam penanganan permukiman kumuh untuk mewujudkan permukiman layak huni diantaranya melalui revitalisasi peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Sebab di Undang-Undang Dasar 1945 di sebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin dalam lingkungan yang layak. Hal tersebut pula yang dijadikan dasar hukum dalam pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

Pemukiman kumuh salah satu masalah utama dalam pembangunan lingkungan kota, penanganan masalah ini dilakukan secara bertahap dan mengikuti perkembangan kota. Adapun dalam penanganan lingkungan kumuh harus intensif, tepat sasaran, dan menyeluruh. Lingkungan kumuh adalah kawasan pemukiman yang tidak layak huni karena kurangnya lahan terbuka,

kualitas bangunan rendah, kurangnya ketersediaan air bersih, sehingga rawan terhadap masalah kesehatan dan masalah sosial yang membahayakan kehidupan penghuni yang menempati pemukiman tersebut. Pemukiman kumuh biasanya di tempati oleh masyarakat ekonomi menengah kebawah, hal tersebut disebabkan oleh kemampuan finansial mereka yang tidak dapat memiliki tempat tinggal di perumahan nasional. Oleh karena itu, kemiskinan menjadi salah satu faktor peningkatan pemukiman kumuh di Kabupaten Semarang.

Pertumbuhan penduduk merupakan suatu masalah umum yang terjadi di setiap kota terutama kota-kota besar, fenomena pertumbuhan penduduk yang ada di kota besar biasanya dianggap menjadi masalah apabila menyebabkan lingkungan menjadi kumuh atau sulitnya pemenuhan kebutuhan tempat tinggal yang layak. Kondisi lingkungan kumuh dapat terjadi karena jumlah wilayah yang tersedia tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk. Masalah pemukiman kumuh dapat dilihat dan ditandai dengan menurunnya kondisi lingkungan hidup pada setiap kawasan pemukiman.

Peningkatan jumlah penduduk dapat dipengaruhi oleh mobilisasi masyarakat yang berpindah dari desa ke kota untuk menjadi perantau dan akhirnya menetap. Sarana dan prasarana yang dimiliki pemukiman perkotaan merupakan sebuah daya tarik tersendiri yang mengakibatkan mobilisasi masyarakat desa ke kota. Selain itu, prinsip berjuang hidup manusia untuk memperoleh pendapatan ekonomi yang semakin tinggi juga salah satu faktor perpindahan masyarakat desa ke kota. Kabupaten Semarang terletak terbagi atas 16 kecamatan, berikut daftar kecamatan Kabupaten Semarang:

Tabel 1.1 Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Semarang

2020

No	Kecamatan	Luas Wilayah		
		Luas Wilayah (Km ²)	Persentase	Ranking Luas Wilayah
1	Getasan	65,796	6,92%	2
2	Tengaran	47,296	4,98%	13
3	Susukan	48,865	5,14%	9
4	Kaliwungu	29,950	3,15%	18
5	Suruh	64,015	6,74%	3
6	Pabelan	47,975	5,05%	11
7	Tuntang	56,242	5,92%	5
8	Banyubiru	54,415	5,73%	7
9	Jambu	51,627	5,43%	8
10	Sumowono	55,630	5,85%	6
11	Ambarawa	28,221	2,97%	19
12	Bandungan	48,233	5,08%	10
13	Bawen	46,570	4,90%	14
14	Bringin	61,891	6,51%	4
15	Bancak	43,846	4,61%	15
16	Pringapus	78,352	8,25%	1
17	Bergas	47,332	4,98%	12
18	Ungaran Barat	35,960	3,78%	17
19	Ungaran Timur	37,992	4,00%	16
Jumlah		950,207	100,00%	

Sumber: BPS Kabupaten Semarang

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa Kabupaten Semarang memiliki luas 950,207 km², wilayah yang memiliki luas terbesar, yakni Kecamatan Pringapus dengan luas 78,3 km² sebaliknya kecamatan yang memiliki luas paling kecil adalah Kecamatan Ambarawa dengan luas 28,2 km². Kabupaten Semarang memiliki penduduk yang heterogen terdapat beragam suku budaya yang bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, etnis tersebut seperti Jawa, Cina, Sunda dan masih banyak lagi, berikut jumlah penduduk di Kabupaten Semarang:

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk berdasarkan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Semarang 2017-2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)			
		2017	2018	2019	2020
1	Getasan	51.029	51.399	51.759	52.932
2	Tengaran	71.254	72.207	73.156	71.966
3	Susukan	44.013	44.071	44.120	49.545
4	Kaliwungu	26.650	26.657	26.658	30.311
5	Suruh	60.409	60.424	60.426	70.088
6	Pabelan	39.790	40.099	40.402	44.457
7	Tuntang	65.865	66.573	67.273	68.700
8	Banyubiru	43.105	43.462	43.811	44.294
9	Jambu	39.248	39.583	39.911	40.642
10	Sumowono	30.792	30.904	31.009	33.967
11	Ambarawa	62.651	63.193	63.725	63.753
12	Bandungan	57.229	57.849	58.463	58.799
13	Bawen	62.231	63.437	64.652	59.675
14	Bringin	43.069	43.306	43.535	46.441
15	Bancak	20.094	20.098	20.099	23.888
16	Pringapus	57.344	58.380	59.423	56.885
17	Bergas	85.022	87.609	90.258	75.910
18	Ungaran Barat	85.557	87.182	88.818	81.074
19	Ungaran Timur	82.137	84.196	86.288	79.767
Jumlah		1.027.489	1.040.629	1.053.786	1.053.094

Sumber: Kabupaten Semarang Dalam Angka 2021 (Diolah)

Pada tahun 2019 Kabupaten Semarang memiliki jumlah penduduk yang paling besar dari tahun-tahun sebelumnya, yakni mencapai ±1,5 juta jiwa, akan tetapi pada tahun 2020 terjadi sedikit penurunan jumlah penduduk. Adapun pada tahun 2020 penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Ungaran Barat, yakni dengan 81.074 jiwa, sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit di Kabupaten Semarang terletak pada Kecamatan Bancak dengan jumlah 23.888 jiwa. Pemukiman kumuh dapat dilihat dari tingkat kepadatan penduduk. Rikhwanto (2009) menjelaskan bahwa pemukiman kumuh memiliki keterkaitan

dengan kepadatan penduduk baik berasal dari pertumbuhan penduduk atau Urbanisasi. Berikut tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Semarang:

Tabel 1.3 Kepadatan Penduduk di Kabupaten Semarang 2016-2020

Tahun	(jiwa/km²)
2016	1.067
2017	1.081
2018	1.095
2019	1.109
2020	1.108

Sumber: Kabupaten Semarang Dalam Angka 2021 (Diolah)

Pertambahan tingkat penduduk di Kabupaten Semarang bertambah mengikuti berjalanya waktu, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan kecil. Dari tabel 3 mengenai Kepadatan Penduduk di Kabupaten Semarang pada tahun 2016-2020 dapat diketahui setiap 1 kilometer terdapat 1.108 jiwa yang bertempat tinggal pada wilayah tersebut. Kepadatan penduduk memiliki keterkaitan dengan terciptanya pemukiman kumuh, menurut Surat Keputusan Bupati Semarang Nomor 59/0473/2020 Tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Semarang, menyebutkan kawasan kumuh menjadi kewenangan DPU (Dinas Pekerjaan Umum) Kabupaten Semarang, berikut letak lokasi lingkungan perumahan dan pemukiman kumuh di Kabupaten Semarang:

Tabel 1.4 Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Semarang Tahun 2020

No	Lokasi	Luas (Ha)
1	Desa Mluweh Kecamatan Ungaran Timur	31
2	Desa Kawengen Kecamatan Ungaran Timur	81,17
3	Desa Kalikayen Kecamatan Ungaran Timur	32,12
4	Kelurahan Gedanganak Kecamatan Ungaran Timur	18,55
5	Kelurahan Bandungan Kecamatan Bandungan	11,51
6	Kelurahan Kupang Kecamatan Ambarawa	19,85
7	Kelurahan Tambakboyo Kecamatan Ambarawa	10,85
8	Desa Penawangan Kecamatan Pringapus	23,07
9	Desa Candirejo Kecamatan Pringapus	38,8
10	Desa Wonoyoso Kecamatan Pringapus	24,61
11	Desa Jatirunggo Kecamatan Pringapus	35,07
12	Desa Pringsari Kecamatan Pringapus	23,62
13	Desa Wonorejo Kecamatan Pringapus	42,2
14	Desa Gondoriyo Kecamatan Bergas	61,32
15	Kelurahan Karangjati Kecamatan Bergas	23,9

Sumber: SK Bupati Semarang Nomor 59/0473/2020

Menurut SK Bupati Semarang Nomor 59/0473/2020 Tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Semarang mayoritas lahan kumuh berlokasi di Kecamatan Ungaran Timur dan Kecamatan Pringapus. Luasnya kawasan kumuh dapat dipengaruhi oleh kepadatan penduduk, jumlah kepadatan penduduk di Kabupaten Semarang pada tahun 2020 tercatat mencapai 1.108 jiwa/km², dengan adanya kondisi tersebut maka diperlukan kebijakan penataan lingkungan yang relevan dengan kondisi lingkungan.

Program KOTAKU merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi masalah kawasan permukiman kumuh, yang dulunya program ini disebut sebagai P2KKP hingga berganti nama menjadi Program KOTAKU. Berdasarkan data yang diambil dari Kabupaten Semarang dalam Angka 2021,

dengan luasan Kecamatan Ungaran Timur sebesar 37,992 km², kecamatan ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 79.767 jiwa, sehingga jika dihitung kepadatan penduduknya Kecamatan Ungaran Timur memiliki kepadatan penduduk sekitar 2.099 jiwa/km². Adapun luas kawasan kumuh Kecamatan Ungaran Timur berdasarkan SK Bupati Kabupaten Semarang Nomor 59/0473/2020 Tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh mencapai 162,84 Ha. Kawasan kumuh tersebut tersebar pada beberapa kelurahan dan desa yakni Desa Mluweh, Desa Kalikayen, Desa Kawengen dan Kelurahan Gedanganak. Wilayah di Kabupaten Semarang yang mendapatkan dana bantuan untuk implementasi Program KOTAKU yaitu Kelurahan Gedanganak Kecamatan Ungaran Timur dan Kelurahan Tambakboyo Kecamatan Ambarawa. Kedua kelurahan tersebut mendapat dana bantuan program KOTAKU berdasarkan pengajuan RPLP yang dibantu oleh Dinas Pekerjaan Umum Kab. Semarang, bedanya dalam proses pelaksanaan implementasinya di Kelurahan Gedanganak Kecamatan Ungaran Timur sudah dalam proses implementasi, sedangkan di Kelurahan Tambak Boyo Kecamatan Ambarawa masih dalam proses Perencanaan.

Penyelenggaraan Kota Tanpa Kumuh diatur dalam Peraturan Menteri PUPR No 2 Tahun 2016 yang menyebutkan kriteria perumahan dan permukiman kumuh dapat ditinjau dari:

- a. Bangunan Gedung yang meliputi tingkat kepadatan bangunan, ketidakaturan bangunan dan kualitas bangunan.

- b. Jalan lingkungan yang meliputi kualitas jalan yang buruk dan jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan tersebut
- c. Penyediaan air minum yang meliputi ketersediaan air minum dan terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar.
- d. Drainase lingkungan, yang meliputi drainase lingkungan yang tidak mengalirkan air dengan baik, tidak adanya drainase dan konstruksi drainase yang buruk.
- e. Pengelolaan air limbah yang harus sesuai dengan standar teknis, dan terdapat sarana prasarana yang memenuhi standar.
- f. Pengelolaan persampahan, harus sesuai dengan standar teknis, terdapat sarana prasarana yang memenuhi standar, serta pemeliharaan pengelolaan sarana prasarana
- g. Proteksi kebakaran, yang meliputi ketersediaan sarana dan prasarana proteksi kebakaran.

Berdasarkan peninjauan obeservasi prapenelitian yang dilakukan peneliti, ditemukan beberapa keberadaan permukiman kumuh di lingkungan Kelurahan Gedanganak,

Gambar 1.1 Permukiman Kumuh di Kelurahan Gedanganak



Sumber : dokumen pribadi

Program KOTAKU ditingkat kelurahan dikelola oleh BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) daerah setempat, dengan adanya program tersebut diharapkan mampu mengurangi kawasan kumuh di Kabupaten Semarang. Program KOTAKU di Kelurahan Gedanganak mulai dijalankan pada tahun 2016 dengan target berkurangnya kawasan permukiman kumuh melalui program tersebut. Untuk mencapai target tersebut, perlu adanya implementasi kebijakan sesuai dengan peraturan yang ada agar dapat diimplementasikan secara maksimal. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka muncul pertanyaan untuk penelitian “Mengapa Implementasi Program KOTAKU di Kelurahan Gedanganak belum mencapai tujuan program?”

1.2 Identifikasi Masalah

1. Sebagian besar pemukiman kumuh di Kabupaten Semarang terletak di beberapa wilayah kecamatan Ungaran Timur, salah satunya adalah kelurahan Gedanganak
2. Kelurahan Gedanganak merupakan kelurahan yang dekat dengan pabrik-pabrik sehingga memungkinkan lingkungan sekitarnya tercemar limbah industri.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Gedanganak Kecamatan Ungaran Timur?
2. Apa faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Gedanganak Kecamatan Ungaran Timur?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis Implementasi Program KOTAKU dalam upaya mengurangi pemukiman kumuh di Kelurahan Gedanganak Kecamatan Ungaran Timur.
2. Menganalisis faktor penghambat dalam Implementasi Program KOTAKU di Kelurahan Gedanganak Kecamatan Ungaran Timur.

1.5 Manfaat penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis hendak menjelaskan mengenai penerapan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Gedanganak Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang.

1.5.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang

Hasil penelitian ini dapat digunakan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang sebagai masukan dalam menjalankan Program KOTAKU

- b. Bagi Badan Keswadayaan Masyarakat Mugi Makmur Kelurahan Gedanganak

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi Badan Keswadayaan Masyarakat Mugi Makmur Kelurahan Gedanganak sebagai masukan dalam pelaksanaan program KOTAKU dengan melihat aspek lingkungan dan masyarakat.

1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Judul dan Penulis	Metode Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil
Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh Di Kecamatan Semarang Timur. Jurnal Administrasi Publik. 2019. Stevanni Imelda C, Titik Djumiarti	Metode kualitatif deskriptif.	Mengetahui bagaimana implementasi program KOTAKU di Kecamatan Semarang Timur	Menunjukkan adanya penurunan luas kawasan pemukiman kumuh dari 415,83 Ha menjadi 118,5 Ha.
Kolaborasi dalam Perencanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Semanggi Kota Surakarta. Jurnal Wacana Publik Vol 1 No 2, 2017. Sri Yuliani, dan Gusty Putri Dhii Rosyida	Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi.	Mengetahui bentuk kolaborasi yang dilakukan dalam perencanaan Program KOTAKU.	Menunjukkan bahwa kolaborasi masih kurang efektif karena dan memerlukan pemerataan persepsi tentang bentuk kolaborasi, selain itu kolaborasi belum diimplementasikan dalam perencanaan program KOTAKU di Kelurahan Semanggi karena hanya beberapa stakeholder yang terlibat dalam setiap tahap. Sejauh ini ada pula rintangan kerjasama dalam bentuk sumber daya

			manusia dan kendala komunikasi antara masing-masing stakeholder.
Implementasi Program KOTAKU dalam Revitalisasi Daerah Kumuh di Kelurahan Rejomulyo Kota Semarang Jurnal Administrasi Publik. 2019. Rani Eliza Zethary dan Hartuti Purnaweni	Metode penelitian adalah deskriptif kualitatif. Data primer dikumpulkan melalui wawancara, observasi lapangan, sedangkan, data sekunder dikumpulkan melalui literatur.	Mengetahui bagaimana implementasi Program KOTAKU di Kelurahan Rejomulyo	Pelaksanaan program Kotaku di Kelurahan Rejomulyo sudah berjalan dengan baik namun belum ada konsistensi dalam menjalankan tahap keberlanjutannya.
Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dalam Menanggulangi Kawasan Kumuh di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang.	Metode penelitian yang digunakan untuk kali ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif ini	Menganalisis bagaimana implementasi Program KOTAKU di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang serta mengidentifikasi	Menunjukkan bahwa implementasi program Kotaku di Kelurahan Tanjung Mas sejauh ini sudah berjalan dengan baik, mulai dari tahapan persiapan, perencanaan hingga tahap pelaksanaan.

<p>Jurnal Administrasi Negara. 2020. Vol 8, No 1. Herta Sitorus, Retno Sunu Astuti, dan Hartuti Purnaweni</p>	<p>menggunakan teknik pengumpulan data primer (observasi dan wawancara) serta data sekunder.</p>	<p>faktor yang menjadi penghambat maupun pendukung dalam implementasi program ini.</p>	
<p>Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tugu Kota Semarang Jurnal Administrasi Publik. 2019. Ika Nur Rachma, dan Nina Widowati</p>	<p>Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dilakukan dengan wawancara kepada informan yang dipilih berdasarkan teknik <i>purposive sampling</i>.</p>	<p>Menganalisis implementasi kebijakan pemerintah tentang program Kotaku di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tugu dan untuk mengetahui faktor pendorong maupun faktor penghambat yang terjadi dalam pelaksanaan program tersebut.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Kotaku di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tugu sudah sesuai dengan Surat Edaran DJCK Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Kota Tanpa Kumuh tersebut dibuktikan dengan telah terlaksananya program mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, hingga keberlanjutan.</p>

<p>Penerapan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia <i>(Implementation Of Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Programs To Enhance The Community Welfare In Malang City, East Java, Indoensia)</i> Departement of Social Welfare Secience, Faculty of Social Science and Political Science, Unviersity of Muhammadiyah Malang. 2019. Zaenal Abidin</p>	<p>Metode penelitian dalam penelitian ini dengan jenis penelitian kualitatif menggunakan tipe deskriptif.</p>	<p>Mengetahui implementasi program KOTAKU pada aspek aksesibilitas kesejahteraan masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, pelibatan warga dalam KOTAKU, perubahan sosial dan fungsi kelembagaan sosial.</p>	<p>Aspek kesejahteraan masyarakat terkait akses kesehatan dan pendidikan sudah baik, namun perubahan perilaku, kesadaran dan pranata sosial kurang optimal berfungsi, program acara yang kurang melibatkan masyarakat.</p>
--	---	--	--

<p>Jejaring Kebijakan dalam Pelaksanaan Program Kota Tanpa Pemukiman Kumuh di Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung. (<i>Policy Networks in the Implementatuon of Cities Without Slums Program in Baleendah District, Bandung Regency</i>) Public Administration Jurnal. 2020. Ahmad Hadi, Budiman Rusli, dan M. Benny Alexandri</p>	<p>Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dan hasil penelitian diperoleh dari studi pustaka dan studi lapangan yaitu observasi, dokumentasi, dan wawancara.</p>	<p>Mengetahui bentuk jejaring kebijakan yang ada pada program kotaku KOTAKU di Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung.</p>	<p>Jaringan Kebijakan dalam Pelaksanaan Program KOTAKU di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung belum optimal karena beberapa karakteristik yang ada pada jaringan kebijakan tersebut adalah representasi, struktur kekuasaan horizontal dan kepemimpinan kolaboratif.</p>
<p>Indikator Kinerja Program Prasarana Dasar Kotaku (Kota Tanpa</p>	<p>Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif.</p>	<p>Mengetahui indikator yang berpengaruh dalam pelaksanaan</p>	<p>Tingkat permukiman kumuh dapat diturunkan menjadi 19% (bukan permukiman kumuh) dengan melakukan</p>

<p>Permukiman Kumuh). <i>(Performance Indicators of Basic Infrastructure of KOTAKU Program (The City Without Slums))</i> Jurnal Teknik Sipil dan Perencanaan. 2020. Awilya Tribhuwana, dan Ohan Farhan.</p>	<p>Pengukuran kualitatif dimulai dengan penilaian hasil numerik pada tingkat permukiman kumuh regional. Selain itu, data kuantitatif menggunakan simulasi lakip dengan menggunakan hasil performance tahapan program KOTAKU</p>	<p>Program KOTAKU.</p>	<p>perbaikan sarana dan prasarana dasar. Di tahun berikutnya, dengan melibatkan Pertunjukan Lakip, tahap perencanaan dapat ditingkatkan melalui partisipasi masyarakat dan keterlibatan aktif.</p>
<p>Analisis Pelaksanaan Kebijakan Kota Tanpa Kumuh Kementrian PUPR di Langsa. <i>(Analysis Of City Policy Implementation</i></p>	<p>Metode dalam penelitian ini adalah disclaimer kualitatif dengan teknik analisis data</p>	<p>Menganalisis implementasi kebijakan perkotaan tanpa permukiman kumuh (KOTAKU) Kementerian Pekerjaan</p>	<p>Pertama, implementasi kebijakan KOTAKU telah dilaksanakan dari tahun 2016 hingga saat ini namun belum sepenuhnya merata di wilayah Kota Langsa, dan masih ditemukan tahapan analisis yang belum</p>

<p><i>Without The Slum Ministry Of Public Work And Housing in Langsa)</i></p> <p>Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fisip Unsyiah. 2019. Vol 4, No 4. Ade Miranda dan Dr. Zahratul S.H</p>	<p>menggunakan teori implementasi kebijakan Jeffrey Pressman dan Aaron Wildavsky, meliputi klasifikasi perencanaan, analisis,</p>	<p>Umum dan Perumahan Rakyat di Kota Langsa serta untuk mengetahui peran Pemerintah dalam penyelesaian permukiman kumuh di Kota Langsa</p>	<p>sepenuhnya terlaksana. Kedua, Pemerintah Kota Langsa berperan aktif dengan merumuskan program KOTAKU dalam RPJM 2017-2022, dan ditemukan kendala Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pembentukan kelompok LSM (KSM) sebagai kelompok yang menjalankan wujud implementasi program KOTAKU.</p>
<p>Implementasi Kota Kolaboratif Program Pemerintahan di Kota Tanpa Permukiman Kumuh (Kotaku) di Pasuruan, Indonesia. (<i>The Implementation of Collaborative Urban Governance in City Without Slums Program</i></p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan merumuskan model Collaborative Urban Governance.</p>	<p>Menjelaskan dan membuat model Tata Kelola Kota Kolaboratif dalam Implementasi Program Kota Tanpa Permukiman Kumuh (KOTAKU).</p>	<p>Permukiman Kumuh (KOTAKU) belum menunjukkan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Pelaksanaan Program KOTAKU belum terlaksana dengan baik. Hal itu ditunjukkan dengan keberadaan permukiman kumuh perkotaan yang cenderung meningkat. Tidak ada keterlibatan kelompok kerja antara (POKJA) yang bertugas sebagai pelaksana program, dan</p>

<p><i>(KOTAKU) in Pasuruan, Indonesia)</i></p> <p>Archives in Social Science, Education, and Humanities Research. Volume 436. 2019. Tri Sulistyaningsih, Muhkhammad Yusuf Putra Pamungkas, Indah Dwi Maulana dan Asep Nurjaman.</p>			<p>kurangnya keterlibatan masyarakat dalam Program KOTAKU. Apalagi, tidak adanya tokoh masyarakat, pelaksana program yang tidak fleksibel dengan masyarakat, dan kurangnya komunikasi antar pemangku kepentingan.</p>
---	--	--	---

1.6.2 Administrasi Publik

Pada dasarnya administrasi dapat disebut sebagai pengelolaan, proses, tata kelola, bahkan manajemen. Sebagai ilmu, administrasi memiliki arti luas dan arti sempit. Arti luas administrasi dapat dikatakan sebagai sebuah proses pencapaian tujuan yang dilakukan dengan usaha atau kerja sama oleh kelompok tertentu, sedangkan arti sempit yang berarti sebuah tindakan pengelolaan data informasi melalui penyusunan dan pencatatan secara sistematis untuk menyediakan informasi agar dapat di peroleh kembali

Menurut Waldoi(dalam Pasolong, 2014:8), administrasi publik adalah salah satu perwujudan ilmu berupa tindakan mengorganisir dan manajemen sumber daya sumber daya untuk mencapai tujuan pemerintah. Pendapat tersebut berbeda

dengan Edward H. Litchfield, yang menyatakan bahwa administrasi publik merupakan studi yang memiliki keterkaitan dengan badan pemerintahan yang diorganisir, difasilitasi, dibiayai, digerakan dan dipimpin (dalam Inu Kencana Syafie 2010:25) Istilah kata publik dalam bahasa Indonesia merupakan serapan dari kata public yang bersasal dari Bahasa Inggris, kata tersebut memiliki dua makna. Makna yang pertama, sebagai kata sifat (public) yang berarti memiliki keterkaitan hubungan yang sangat banyak terhadap masyarakat umum, yang kedua sebagai kata benda (the public), yang berarti keseluruhan atau berbentuk umum, dan universal (Leo Agustino, 2016:7).

Berdasarkan definisi Administrasi Publik yang telah dikemukakan beberapa ahli di atas maka dapat diambil kesimpulan, bahwa administrasi publik merupakan kombinasi praktek secara terpadu yang dilakukan oleh satu orang atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan yaitu terpenuhinya kebutuhan publik secara efektif dan efisien

1.6.3 Kebijakan Publik

Ekonomi, politik, sosial budaya, hukum dan bidang kegiatan lainnya merupakan salah satu cakupan yang termasuk dalam lingkup Kebijakan Publik. Kebijakan publik bersifat universal, karena berlaku untuk umum atau semua orang baik itu dalam lingkup nasional maupun lokal seperti keputusan bupati/walikota, peraturan daerah kabupaten/kota, keputusan gubernur, peraturan pemerintah daerah provinsi, peraturan menteri, peraturan persiden, peraturan pemerintah, dan undang undang.

Kebijakan publik adalah sebuah keputusan yang diambil pemerintah untuk menghadapi tantangan dan dinamika yang terjadi di masyarakat dan lingkungan pemerintahan (Thomas R. Dye, dalam Inu Kencana Syafie 2010:105). Ada dua karakteristik kebijakan publik menurut Nugroho yaitu yang pertama kebijakan publik adalah sebuah hal yang mudah untuk diukur karena ukurannya yang jelas seperti seberapa jauh pencapaian tujuan yang sudah diharapkan, yang berikutnya kebijakan publik adalah istilah sangat mudah untuk dipahami, karena makna dari kebijakan publik itu sendiri adalah sesuatu yang dilakukan dan direncanakan untuk mencapai tujuan bersama ataupun tujuan nasional. Beberapa proses tahapan yang harus dilakukan untuk melaksanakan Kebijakan Publik yaitu meliputi penyusunan rencana atau agenda kebijakan publik, proses untuk merumuskan kebijakan, ilegitimasi kebijakan, implementasi kebijakan atau pelaksanaan kebijakan, dan yang terakhir evaluasi terhadap pencapaian kebijakan (Budi Winarno, 2007: 32–34).

1.6.4 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dapat dikatakan sebagai sebuah proses pelaksanaan suatu kebijakan, menurut Wahab (dalam Andi, 2018: 22) implementasi berarti proses penyediaan sarana prasarana untuk kegiatan tertentu, menimbulkan dampak dalam kegiatan tertentu. Lineberry menyatakan (dalam Fadillah, 2003:81) bahwa implementasi adalah sebuah tindakan pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta baik secara mandiri atau berkerjasama untuk mencapai tujuan dan sasaran prioritas pada kebijakan yang sudah direncanakan. Adapun menurut Grindle implementasi merupakan proses dari sebuah kebijakan yang

hanya dapat dilakukan jika sasaran dan tujuan dari kebijakan tersebut sudah diputuskan, disahkan, dan pelaksanaan kegiatan sudah terorganisir untuk mencapai tujuan (Mulyadi, 2016:47).

Implementasi adalah kepekaan dan mengerti apa yang dalam suatu kebijakan yang dilakukan atau dirumuskan (Danierl A. Mazmanian dalam Wahab 2010:65). Perhatian dari implementasi kebijakan berupa kenyataan yang timbul dalam sasaran kebijakan setelah diberlakukannya kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah. Adapun studi implementasi Jankins (dalam Andi, 2018:24) adalah sebuah studi yang mempelajari tentang perubahan terjadi, dan kemungkinan munculnya perubahan. Selain itu implementasi adalah studi mengenai mikro struktur kehidupan pada bidang politik, interaksi organisasi, dan motivasi yang menyebabkan mereka bertindak.

Van Meter dan Van Hord (dalam Winarno, 2008:152) menyatakan bahwa implementasi dapat berupa aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh organisasi pada sektor publik guna mencapai tujuan yang telah direncanakan. Van Meter dan Van Hord (dalam Andi, 2018;25) juga mengemukakan terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi implementasi yaitu:

- a. Sasaran dan standar kebijakan harus jelas dan terukur.
- b. Sumber daya, dukungan sumberdaya termasuk unsur yang penting dalam implemntasi kebijakan berupa SDM maupun non SDM.
- c. Hubungan antara organisasi, pelaksanaan kebijakan pasti terdapat aktor-aktor yang bertanggungjawab pada kebijakan tersebut,

hubungan antar organisasi diperlukan agar saling berkolaborasi dalam implementasi kebijakan.

- d. Karakteristik pelaksana implementasi kebijakan yang berupa aturan dan struktur organisasi.
- e. Kondisi kehidupan seperti sosial, ekonomi. Dukungan terhadap implementasi kebijakan dapat berasal dari berbagai bidang seperti kondisi sosial, dan ekonomi.
- f. Disposisi implementor kebijakan yang berupa respon implementor, kognisi implementor kebijakan dan intensitas disposisi implementor.

Implementasi kebijakan adalah pengendalian aksi-aksi kebijakan untuk mewujudkan kebijakan ke kenyataan yang terjadi (William N. Dunn dalam Andi, 2018:27). Implementasi merupakan perwujudan bukti nyata dan riil dari rencana pelaksanaan kebijakan pada waktu tertentu. Kesimpulan dari pendapat para ahli di atas yaitu implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan dan direncanakan oleh pemerintah atau pihak lain untuk mencapai tujuan bersama yang sudah disepakati ketika perumusan kebijakan tersebut.

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan karena Program KOTAKU di Kelurahan Gedanganak masih berjalan (*on going*) sejak tahun 2017 dan dilihat melalui aspek proses implementasi melalui tahapan-tahapan implementasi.

1.6.5 Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

Surat Edaran No. 40 Tahun 2016 Kementerian PUPR adalah peraturan yang mengatur mengenai Program KOTAKU, program ini adalah program berskala nasional harus dilaksanakan dengan tepat sasaran. Menurut Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun, program ini dilaksanakan dengan melakukan pembangunan dan pengembangan permukiman melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup. Berbeda dengan pendapat Irfani (2018:3) yang menjelaskan bahwa permukiman kumuh di Indonesia diatasi melalui Program KOTAKU dengan membentuk lingkungan permukiman yang layak huni dengan cara mengelola dan menata lingkungan hidup.

Program KOTAKU bertujuan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan di lingkungan permukiman kumuh supaya permukiman menjadi lingkungan yang layak huni. Selain memperbaiki infrastruktur sesuai dengan indikator permukiman kumuh, tujuan dari program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan masyarakat. Pemerintah membentuk program ini sebagai upaya untuk mengatasi perluasan lahan kumuh dan mencegah timbulnya lahan kumuh yang baru. Permukiman kumuh adalah sebuah permukiman yang bangunannya saling berdekatan satu sama lain, dan rumah yang dihuni penduduk tidak layak (Askari dan Gupta, 2016:117). Berbeda dengan pendapat Pigawati dan Nursyahbani (2015:269) permukiman kumuh timbul akibat dari pesatnya laju pertumbuhan penduduk yang dibarengi meningkatnya kebutuhan lahan tempat tinggal dan tidak disertainya pengendalian pembangunan yang baik.

Implementasi Program KOTAKU dibagi menjadi beberapa tahapan, pada seluruh tahapan terdapat kerjasama dan keterlibatan antara pemerintah, kelurahan dan masyarakat di lingkungan tersebut. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan berikut terdapat beberapa tahapan pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Gedanganak sebagai berikut;

1) Tahap Persiapan

Tahap persiapan dilaksanakan untuk membentuk kontribusi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintahan tingkat desa dan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini meliputi penggalangan relawan untuk terlibat dalam Program KOTAKU, selain itu kegiatan utama pada tahapan persiapan yaitu sosialisasi dan pemetaan data baseline oleh TIPP.

Kegiatan sosialisasi bertujuan untuk membentuk kepedulian masyarakat agar berpartisipasi dalam pelaksanaan tahapan-tahapan program KOTAKU. TIPP (Tim Inti Perencanaan Partisipatif) tingkat desa/kelurahan beranggotakan Ketua RT dan RW, TIPP ditingkat desa/kelurahan dibentuk untuk membantu BKM dalam melakukan pemetaan data baseline yang terdiri dari indikator permukiman kumuh.

2) Tahap Perencanaan

Pada tahap ini dilakukan perencanaan terhadap kondisi lingkungan permukiman kumuh, perencanaan tersebut dilakukan dengan dasar yang diperoleh dari pemetaan data baseline, rumusan kondisi permukiman tersebut dituangkan dalam dokumen RPLP. Pembentukan KSM juga merupakan salah

satu kegiatan yang masuk dalam tahapan perencanaan, KSM dibentuk oleh BKM yang anggotanya dipilih secara langsung dan memiliki kelebihan dalam pembangunan infrastruktur karena tugas KSM itu sendiri adalah mengkoordinasikan masyarakat ketika pelaksanaan program KOTAKU berlangsung.

3) Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan proses eksekusi dari perencanaan yang sudah direncanakan. RPLP merupakan acuan yang digunakan dalam tahapan pelaksanaan karena kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur sudah direncanakan dalam RPLP, kegiatan utama pada tahap ini adalah pembangunan infrastruktur yang sudah direncanakan baik itu pembangunan ulang ataupun perbaikan. Kegiatan tersebut dilakukan bersama-sama saling kolaborasi antara implementor dan masyarakat setempat.

4) Tahap Keberlanjutan

Tahap keberlanjutan merupakan tahap terakhir dalam implementasi Program KOTAKU, tahapan ini dilakukan setelah pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Pada tahap ini dibentuk KPP (Kelompok Pemelihara dan Pemanfaat) yang bertugas untuk memelihara dan memanfaatkan infrastruktur yang sudah dibangun dengan melibatkan masyarakat setempat.

1.6.6 Model Implementasi Kebijakan

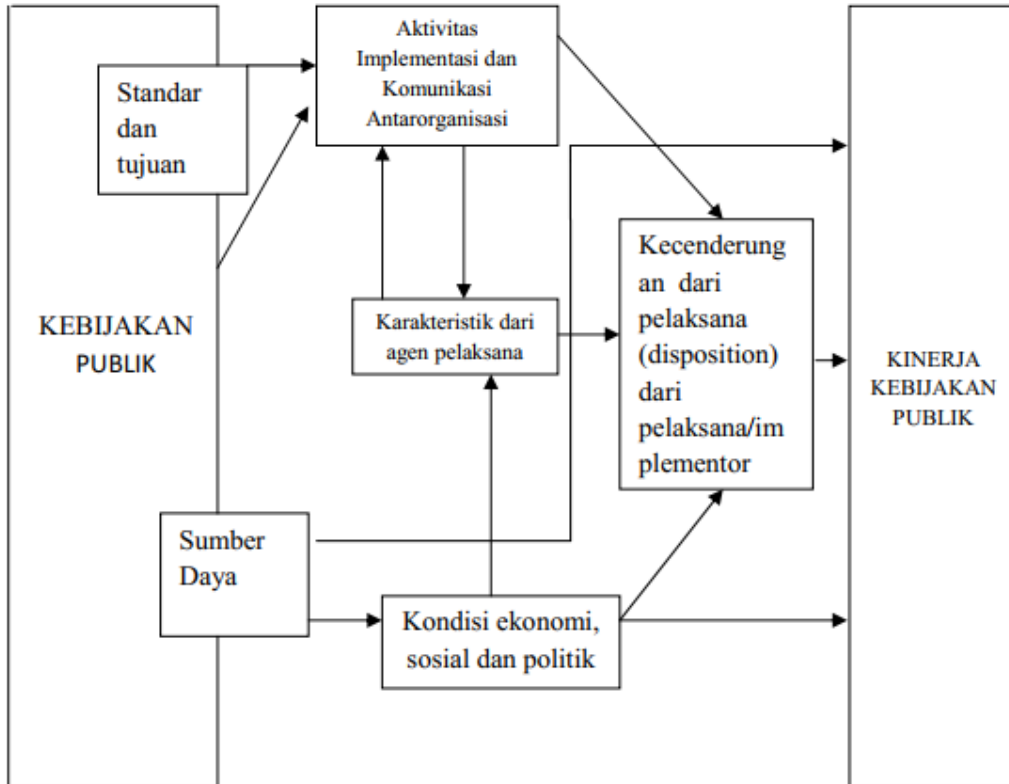
Implementasi adalah salah satu tahap tindak lanjut dari proses kebijakan yang sudah dirumuskan. Terdapat dua langkah dalam mengimplementasikan kebijakan public, yang pertama dengan mengimplementasikan langsung dalam bentuk program, dan yang kedua dengan cara melalui formulasi kebijakan atau turunan dari kebijakan publik tersebut (Handoyo, 2012:101). Kemudian keberhasilan implementasi kebijakan juga dikemukakan oleh Ramdhani (2017:6) yang menyatakan keberhasilan implementasi kebijakan bisa diukur dan dievaluasi berdasarkan enam dimensi yaitu transparansi, konsistensi, efektivitas, akuntabilitas, efisiensi dan keadilan. Selain itu analisis permasalahan kebijakan dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, semakin rumit permasalahan kebijakan, maka harus dilakukan analisis yang semakin mendalam dan dalam menganalisis harus menggunakan operasional atau model-model teori yang tepat. Adapun model-model implementasi kebijakan menurut para ahli yaitu sebagai berikut.

1. Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn

Model ini menggambarkan sebuah implementasi berjalan secara berurutan dari kebijakan publik, pelaksana, dan kinerja dari kebijakan publik. Ali memukakan terdapat beberapa jalan yang menjadi penghubung antara kebijakan dengan prestasi kerja yang dipisahkan oleh beberapa variabel yang saling berkaitan satu sama lain, sehingga jika salah satu variabel mengalami perubahan maka akan berdampak pada variabel lainnya (Ali,2012:110).

“a model of policy implementation process” sebutan dari model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Van Metter dan Van Horn. Model tersebut yang menilai konsep penting implementasi kebijakan yakni meliputi perubahan, control dan kepatuhan bertindak. Selain itu hubungan antara kebijakan dan kinerja juga dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, keberhasilan tersebut bisa ditinjau melalui beberapa variabel yakni ukuran dan tujuan kebijakan, sumber-sumber kebijakan; ciri-ciri atau sifat instansi pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, sikap para pelaksana kebijakan, lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Setiap variabel memiliki keterkaitan dengan tujuan dan sumber sumber kebijakan itu sendiri, sehingga para implementor akan terfokus dalam mengoperasionalkan program kebijakan di lapangan.

Gambar 1.2 Model Van Metter dan Carl Van Horn

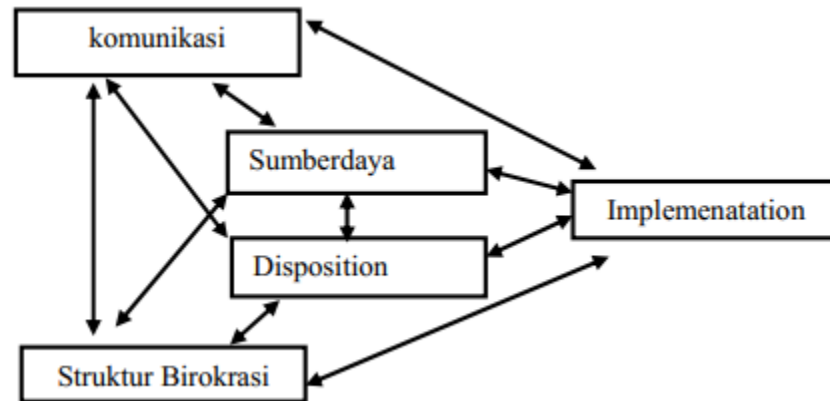


Sumber: Van Meter dan Van Hort (Nugroho dalam Andi, 2018:28)

2. Model Geogrgce C. Edwards III

Model implementasi Edward III sering disebut dengan *Direct and Impact on Implementation* (Suratman, 2017:93), model ini dikembangkan untuk berfokus pada struktur pemerintahan dalam proses implementasi. Praktik Implementasi didasari pada asumsi bahwa hasil output dan outcome yang dihasilkan dipengaruhi oleh pelaksanaan kebijakan itu sendiri, semakin sistematis, efektif dan efisien implementasi kebijakan, maka akan menghasilkan output yang memuaskan. Menurut Edward III ada beberapa variabel yang menjadi penentu kebijakan, yakni: 1) Komunikasi; 2) Sumber daya; 3) Disposisi; 4) Struktur Organisasi.

Gambar 1.3 Model George C. Edwards III



Sumber: C. Edwards III (Indiahono, 2017:33)

3. Model Mazumania dan Paul Sabatier

Menurut Mazumania dan PauliSabatier (Agustino,2014:145), ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan dari implementasi yang dibagi menjadi tiga variabel utama, yakni:

1. Tingkat kesulitan masalah, meliputi:
 - a. Tingkat kesulitan pada keanekaragaman kelompok target.
 - b. Presentase perbandingan jumlah kelompok target dengan jumlah penduduk.
 - c. Perubahan perilaku pada lingkungan.
2. Karakteristik kebijakan (*ability of statute to structure implementation*), berikut indikatornya:
 - a. Kejelasan pada tujuan kebijakan.
 - b. Dukungan teoritis pada sebuah kebijakan.
 - c. Sumber daya keuangan yang dianggarkan pada kebijakan.
 - d. Seberapa besar tingkat kerjasama dan komunikasi antara pelaksana.

- e. Peraturan yang tertuang harus jelas dan konsisten.
 - f. Komitmen yang kuat untuk mencapai tujuan dari kebijakan.
 - g. Akses partisipasi kelompok luar terhadap implementasi kebijakan.
3. Variabel lingkungan, indikatornya:
- a. Kondisi ekonomi, sosial, dan tingkat perkembangan pengetahuan teknologi.
 - b. Dukungan partisipasi masyarakat untuk kebijakan
 - c. Perilaku lingkungan kelompok target
 - d. Keterampilan implementor harus memadai, dan komitmen tujuan.

4. Model Hogwood dan Gunn

Hogwood dan Gunn (dalam Ali, Alam, 2012:109) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan memiliki beberapa syarat untuk mencapai keberhasilan tujuan kebijakan, berikut beberapa syarat menurut Hogwood dan Gunn:

- a. Terdapat masalah atau kendala.
- b. Waktu, dan Sumberdaya yang mencukupi.
- c. Tersediannya sumber-sumber yang dibutuhkan.
- d. Pelaksanaan kebijaksanaan harus didasari dengan hubungan kausalitas.
- e. Hubungan kausalitas yang memiliki penghubung dan bersifat langsung
- f. Pengurangan hubungan saling ketergantungan
- g. Menyepakati dan memahami pada hal yang sudah disahkan.

- h. Tugas pokok dan fungsi setiap bagian harus disusun dengan istematis dan ditempatkan pada tempat yang tepat.
- i. Memiliki hubungan koordinasi serta komunikasi yang baik.
- j. Kewenangan dan keputusan sempurna merupakan hak kemilikan pada pihak tertentu.

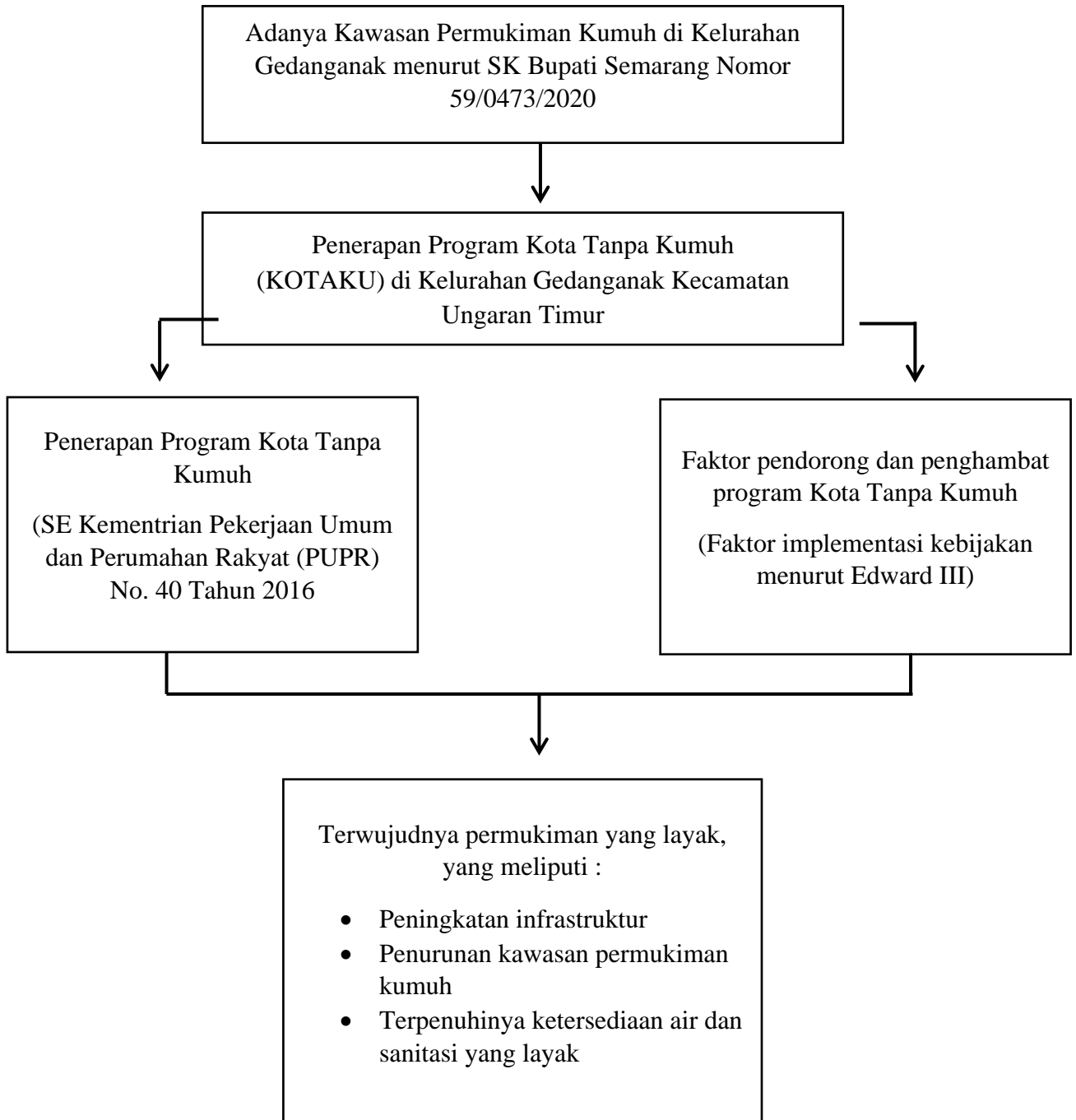
5. Model Soren C. Winter

Model dikembangkan oleh Soren C. Winter (Suratman, 2017:142). Implementasi dilihat sebagai suatu hal yang tidak berdiri sendiri, keberhasilan implementasi ditentukan mulai dari proses formulasi sampai evaluasi, dimana pada proses tersebut terdapat keterkaitan antara proses politik dan administrasi. Winter mengemukakan, terdapat 3 variabel yang mempengaruhi proses implemetasi yaitu:

1. Perilaku organisasi dan antarorganisasi, yang berdimensi pada komitmen dan koordinasi
2. Perilaku birokrasi, yang berdimensi pada kontrol politik, kontrol organisasi, dan etos kerja dan norma-norma profesional
3. Perilaku kelompok target, yang meliputi respon positif dan negative terhadap dukungan suatu kebijakan.

Dari beberapa model implementasi kebijakan menurut para ahli diatas, peneliti menggunakan model implementasi kebijakan Edward III untuk menganalisis penerapan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Gedanganak. Penggunaan model Edward III untuk menggali pengaruh implementasi program KOTAKU dari sudut pandang pelaksana kebijakan.

1.7 Kerangka Pikir



1.8 Fenomena Penelitian

Pertumbuhan penduduk yang tinggi merupakan salah satu fenomena yang saling beriringan dalam perkembangan wilayah, tingginya pertumbuhan penduduk mengakibatkan meningkatnya kepadatan penduduk di wilayah tersebut. Peningkatan tersebut juga memicu semakin besarnya kebutuhan akan lingkungan layak huni, ketidaktersediaan lahan yang memadai memicu munculnya permukiman kumuh. Kabupaten Semarang memiliki daerah kumuh salah satunya yaitu kelurahan Gedanganak, Kecamatan Ungaran Timur.

Program Kota Tanpa Kumuh tersebut menjadi langkah pemerintah daerah Kabupaten Semarang untuk mengurangi kawasan permukiman kumuh. Peneliti melihat bentuk implementasi melalui aspek proses, dengan mengkaji implementasi program melalui terknis tahapan proses implementasi program KOTAKU di Kelurahan Gedanganak, yang mengacu pada SE Kementerian PUPR No.40 Tahun 2016, berikut tahap-tahapnya :

1. Tahap Persiapan
 - 1) Sosialisasi
 - 2) Pembentukan BKM
 - 3) Pemetaan baseline data
2. Tahap Perencanaan
 - 1) Penyusunan RPLP
 - 2) Pembentukan KSM

3. Tahapan Pelaksanaan

- 1) Pencarian Dana
- 2) Pelaksanaan Pembangunan/Konstruksi

4. Tahap Keberlanjutan

- 1) Pembentukan dan Pelatihan KPP
- 2) Kegiatan Pemanfaatan dan Pemeliharaan

Implementasi Program KOTAKU Tanpa Kumuh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan model implementasi kebijakan menurut Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Dalam menganalisis faktor penghambat tersebut terdapat beberapa fenomena yang dapat dilihat, yakni:

a. Faktor Komunikasi

Faktor komunikasi mengenai respon pihak pelaksana yang terlibat dan struktur organisasi, dan ketersediaan sumber daya kebijakan.

b. Faktor Sumberdaya

Unsur penting dalam implementasi kebijakan adalah sumber daya baik itu berupa material, waktu, dan tenaga. Kecapakan pelaksana dalam mengelola dan menggunakan sumberdaya untuk implementasi kebijakan secara efektif dan efisien

c. Faktor Disposisi

Faktor ini dapat diartikan sebagai kesiapan dan ketersediaan implementor dalam mengimplementasikan kebijakan agar sesuai dengan tujuan kebijakan yang ingin dicapai.

d. Faktor Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan harus sesuai dengan organisasi birokrasi sebagai pelaksana kebijakan publik.

Tabel 1.5 Fenomena Penelitian

Fenomena	Sub Fenomena
Implementasi Program KOTAKU (SE Kementrian PUPR No. 40 Tahun 2016)	- Persiapan - Perencanaan - Pelaksanaan - Keberlanjutan
Faktor Pendorong dan Penghambat (Edward III)	- Komunikasi - Sumber daya - Disposisi - Struktur Birokrasi

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Desain Penelitian

Penelitian akan dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian berdasarkan fenomenologi dan paradigma konstruktivisme dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Sebagai tuntutan pengetahuan (knowledge claim) paradigma metodologi penelitian dianut oleh seorang peneliti sebagai prosedur umum penelitian yang meliputi analisis data (research method), jenis pendekatan yang digunakan pada penelitian.

Metode pendekatan kualitatif memiliki yaitu seperti: menggunakan latar belakang yang alamiah, menggunakan instrument utama, yakni: manusia, pengumpulan data melalui (dokumentasi, pengamatan, wawancara dan studi literatur) kemudian data tersebut akan diolah, menganalisis data yang didapat secara induktif, menyusun teori, menganalisis data dengan deskriptif kualitatif, mementingkan sebuah proses proses daripada hasil, melakukan pembatasan masalah penelitian berdasarkan fokus dan kriteria, melakukan validasi data, menggunakan desain penelitian bersifat sementara (dibuat dengan kesesuaian fenomena yang terjadi dilapangan), dan hasil penelitian dirundingkan lalu disepakati bersama dengan narasumber. (Moleong, 2010: 10-13)

Permasalahan yang kompleks, dinamis, perubahan urutan kegiatan, perubahan situasi yang tiba tiba, dan banyaknya gejala-gejala yang ditemukan dilapangan mengakibatkan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti dapat mencari data primer yang bersifat alamian melalui interview/wawancara. Pendekatan metode kualitatif digunakan untuk

menghasilkan data deskriptif berupa pernyataan/keterangan yang mendalam dan perilaku, selain itu metode kualitatif digunakan untuk memahami fenomena yang terjadi di lapangan dan dialami oleh target penelitian seperti tingkah laku, motivasi ataupun tindakan lainnya secara deskriptif dalam bentuk kata, bahasa, yang sesuai dengan metode ilmiah

Penekatan kualitatif memiliki dua tipe penelitian yaitu deskriptif dan eksploratif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan fenomena sosial tertentu dengan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya untuk menjelaskan sebab akibat, korelasi dan hubungan dalam lingkungan penelitian tersebut. Adapun penelitian eksploratif adalah penelitian yang memiliki tujuan untuk menemukan pengetahuan yang lebih baru dari sebelumnya, selain itu penelitian eksploratif merupakan penelitian yang berusaha menggali atau mencari tahu lebih mendalam terhadap suatu permasalahan.

Peneliti memilih untuk menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, bertujuan untuk menggali fakta sebanyak-banyaknya dan menjelaskannya dengan tepat dan jelas. Pengumpulan dan analisa data yang diperoleh untuk menjawab tujuan penelitian, data tersebut berupa pernyataan, keterangan, fenomena, dan dokumentasi bukan angka - angka.

Walaupun nanti terdapat perhitungan angka akan tetapi sifatnya hanya sebagai pendukung atau penunjang saja. Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan memperoleh rincian keadaan objek atau subjek penelitian. Dimana data yang diperoleh nantinya meliputi hasil interview, catatan lapangan, dokumentasi, dan sumber data lainnya. Adapun dalam penelitian kualitatif deskriptif ini, peneliti

mencoba menjelaskan dan menganalisis implementasi Program KOTAKU Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Gedanganak, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang.

1.9.2 Situs Penelitian

Situs penelitian adalah lokasi penelitian dimana penelitian dilaksanakan. Penelitian ini mengambil lokus di Kelurahan Gedanganak, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Adapun penelitian ini berfokus tentang Program KOTAKU Tanpa Kumuh (KOTAKU). Berdasarkan studi literatur terdapat berbagai hal yang dapat mempengaruhi implementasi Program KOTAKU. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk menganalisis serta mencari faktor yang mendukung maupun penghambat implementasi program tersebut.

1.9.3 Subjek Penelitian

Subjek adalah orang akan menjadi informan dengan memberikan informasi yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian. Subyek penelitian inilah yang nantinya dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk sumber informasi mengenai situasi dan kondisi di lokasi penelitian. Teknik pemilihan narasumber dengan menggunakan teknik *purposive*, karena teknik pemilihan informan dilakukan secara sengaja oleh peneliti sesuai kriteria yang sudah ditentukan, teknik pemilihan informan tersebut bertujuan untuk memperoleh data berupa hasil wawancara terhadap beberapa narasumber.

1.9.4 Sumber Data

Data dibedakan menjadi dua, yakni data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif umumnya berbentuk data angka yang harus diolah, atau data kualitatif yang diangkakan. Adapun data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat, pernyataan dan gambar. Sugiyono (2016:14)

Sumber data merupakan informasi berupa data. Sumber data penelitian ini berupa data primer dan sekunder dengan batasan sesuai tujuan penelitian.

1. Data primer adalah data untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang diteliti dengan cara mengumpulkan data yang dilakukan oleh peneliti kepada subjek atau objek yang diteliti, data primer yang diambil menyangkut topik penelitian yang diperoleh saat berada pada lokasi penelitian.
2. Data sekunder adalah data yang sudah dikumpulkan untuk menjadi sumber lain dalam menyelesaikan permasalahan yang sesuai. Data sekunder pada penelitian ini berbentuk literature, artikel, dokumen, laporan, dan peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian.

1.9.5 Teknik Penetapan Informan

Subjek atau informan merupakan narasumber yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi latar penelitian. Subjek penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Dalam pemilihan subjek peneliti menggunakan teknik *purposive*, informan dipilih sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan data agar peneliti mendapatkan data yang tepat. Penelitian ini memiliki tujuan untuk

mendeskripsikan dan menganalisis Program KOTAKU mengidentifikasi faktor penghambat. Subjek yang dibutuhkan harus memahami betul mengenai substansi dalam penelitian ini agar dapat memberikan data sesuai dengan fokus dalam penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti menentukan subjek penelitian berdasarkan pada pertimbangan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi implementasi Program KOTAKU di Kelurahan Gedanganak, antara lain:

- 1) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang;
- 2) Pelaksana program tingkat Kelurahan:
 - BKM Mugi Makmur Kelurahan Gedanganak
 - Tim Inti Perencanaan Partisipatif (RT/RW)
- 3) Masyarakat Kelurahan Gedanganak.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai latar, sumber, dan cara. Dilihat dari settingannya. Data menjadi hal terpenting dalam penelitian. Data pada penelitian ini didapatkan dari sumber-sumber yang dilakukan dengan cara yang bermacam-macam. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan menyesuaikan karakteristik dari bentuk data tersebut, maka teknik pengumpulan data tersebut adalah:

1. Observasi

Teknik ini menjadi teknik dasar dalam penelitian. Observasi yang dilakukan dengan cara mengamati secara jelas, rinci, serta lengkap yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Observasi menjadi penting yang digunakan untuk

menentukan factor serta kemampuan individu untuk mengamati kondisi tersebut. Observasi ini dilakukan untuk menjadi obyek penelitian yang digunakan sebagai sumber data yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

2. Wawancara

Menurut Esterberg (2002), wawancara merupakan kegiatan dimana bertemunya dua orang atau lebih untuknya jawab dan mendapatkan informasi mengenai pembahasan atau topic tertentu. Wawancara yang dilakukan dengan mendapatkan informasi yang jelas dengan melakukan interaksi tanya jawab dengan narasumber yang dilakukan sesuai panduan wawancara. Kemudian peneliti akan mencatat informasi sesuai dengan apa adanya yang disampaikan oleh narasumber.

Jenis wawancara yang dilakukan adalah teknik wawancara terstruktur dengan menyiapkan instrumen penelitian yang ditulis berupa pertanyaan yang sesuai dengan pembahasan yang akan diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara memperoleh data histori (Burhan Bungin, 2010:121). Dokumentasi yaitu “usaha untuk mengumpulkan informasi bisa dari arsip, buku, pendapat, teori, maupun hukum. Dokumentasi ini dilakukan untuk mengumpulkan data yang digunakan untuk membuat kerangka teori. Dokumentasi digunakan untuk memberikan penguatan bukti yang didasarkan pada data dari tiap instansi yang akan kami lakukan penelitian.

4. Literature Review

Data peneliti terdahulu dikumpulkan agar kita dapat mengetahui perkembangan yang ada pada program ini.

1.9.7 Teknik Analisis Data

1. Reduksi data

Kata lain dari reduksi data adalah merangkum, dalam hal ini peneliti memfokuskan pada hal pokok dan penting yang berkaitan dengan topik dan tujuan penelitian, sehingga data yang sudah dirangkum memberikan gambaran.

2. Penyajian Data

Penyajian data dapat ditampilkan dalam bentuk hubungan, bagan, atau uraian singkat tentang data yang sudah direduksi.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah berikutnya dalam analisis data, yakni penarikan kesimpulan, kesimpulan dapat berupa gambaran mengenai objek, kondisi, dan fenomena yang diperoleh sumber data penelitian.

4. Menggunakan software Atlas.ti

Atlas.ti merupakan software yang digunakan untuk membantu penelitian kualitatif, software ini membantu peneliti untuk mengorganisasi, memberikan kode, dan menganalisis data penelitian secara terstruktur dan efisien. Data penelitian yang dapat dibaca oleh software ini berupa data audio, video, gambar, dan transkrip wawancara dalam Ekasatya (2016:53)

1.9.8 Kualitas Data

Sugiyono (2012:267) mengemukakan bahwa uji keabsahan data dalam penelitian lebih fokus kepada uji validitas dan reliabilitas. Namun terdapat salah satu teknik untuk menguji keabsahan data, yakni melalui teknik triangulasi. Menurut Sugiyono (2012:274) menguraikan tiga jenis teknik triangulasi yang meliputi triangulasi sumber, teknis dan waktu.

1. Triangulasi sumber adalah teknik yang digunakan untuk mengecek keabsahan data melalui sumber lain yang telah memperoleh data sebelumnya.
2. Triangulasi teknis, yakni pengujian keabsahan data membandingkan data yang diperoleh melalui metode/teknis yang berbeda.
3. Triangulasi waktu, yaitu menguji keabsahan data yang diperoleh dalam waktu yang berbeda. Contohnya menguji data dari narasumber yang sama dalam waktu yang berbeda. Berdasarkan uraian diatas, dalam penelitian ini pengujian absahan data melalui menggunakan teknik triangulasi sumber, teknis, dan waktu. Adapun data hasil pengecekan itu selanjutnya diuraikan, untuk dapat ditarik kesimpulan.